

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Aisyah, Armany, *Pasang Surut Peran MPR-DPR 1945-2004*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, 2004.
- Alamsah, Nandang, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung, 2000.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ashofa, Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- , *Membangun Sistem Hukum Nasional Yang Berwibawa*, Konstitusi Press, Jakarta, 2008.
- , *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Efektivitas Putusan Badan Kehormatan DPR/DPD*, BPHN Kemenkumham RI, Jakarta, 2011.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Diantha, I Made Pesek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Effendi, Mansyur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Estiningsih, Muji, *Fungsi Pengawasan DPRD, (Tinjauan Kritis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa)*, Universitas Atmajaya Pers, Yogyakarta, 2005.

- Fachruddin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Fahmal, Muin, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Fattah, Nanang, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.
- Fatwa, A. M., *Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi: Jejak Langkah Parlemen Indonesia Periode 1999-2004*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Formappi, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia: Studi dan Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945*, Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Jakarta, 2005.
- Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Gie, The Liang dan Sutarto, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Karya Kencana, Yogyakarta, 1997.
- Gunawan, Markus, *Buku Pintar Calon Anggota Legislatif, DPR, DPRD dan DPD*, Visi Media, Jakarta, 2008.
- Hadjon, Philip M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ke-10, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- Haramain, A. Malik & M.F. Nurhuda, *Mengawal Transisi Refleksi Atas Pemantauan Pemilu '99*, Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (JAMPPI- PB PMII), Jakarta, 2000.
- Hermawan, Rachman, *Etika Pustakawan: Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*, Sagung Seto, Jakarta, 2006.
- Hidjaz, Kamal, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.
- Himawan, Muammar, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta, 2004.
- HR, Ridwan, *Hukum Adminitrasi Negara*. Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.

- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.
- , *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Phinatama Media, Makassar, 2014.
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- , *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Kadarisman, M., *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta, 2013.
- Kansil, C.S.T., *Pemerintah Daerah Di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Kantaprawira, Rusadi, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia Pers, Yogyakarta, 1998.
- Kurniawan, Erni Tris, Sule dan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Laila, *Kode Etik Peserta Didik di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda Kedungwaru*, Institut Agama Islam Negeri, Tulungagung, 2014.
- Marbun, S.F., *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Mas'ood, Mohtar, *Perbandingan Sistema Politik*. Cetakan Ke-16, Universitas Gadjah Mada Pers, Yogyakarta, 2016.
- Munaf, Yusri, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, 2016.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2022.
- Purnomowati, Reni Dwi, *Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana*, Cet. 1, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rizal, Samsul, *Filsafat Pendidikan Islam*, Ciputat Pers, Jakarta, 2002.
- Sadirman, *Interaksi dan Motivasi Belajar*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Sarwoto, *Dasar - dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Setiardja, Gunawan, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia* Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- Simbolon, Maringan Masry, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Sinaga, V. Harlen, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Afabet, Bandung, 2008.
- Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- , *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Sumandhia, Y.W., *Praktek Penyelenggara Pemerintah di Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Sumaryono, E., *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2012.
- Syafiie, Inu Kencana, *Proses Legislatif*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Thaib, Dahlan, *DPR dalam sistem Ketatanegaraan Indonseia*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Tjandra, W. Riawan, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006.

Wahab, Solihin Abdul, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008.

Winarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

Yahya, Yohannes, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Peraturan DPR Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Peraturan DPR Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Kamus

Marwan, M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

D. Jurnal dan Makalah

Abislom, Rinaldi L., “Kedudukan Dan Fungsi Badan Legislatif Pasca Amandemen UUD 1945”, *Jurnal Lex Administratum*, Volume I, Nomor 3, Juli-September 2013.

Alam, Aztri Fithrayani, ”Efektivitas Pelaksanaan Tugas Komisi Yudisial Indonesia Penghubung Dalam Mewujudkan Peradilan Bersih”, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2018.

Ardi, R. Alif, dkk, “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

Asshiddiqie, Jimly, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, *Makalah: Konsep Negara Hukum Indonesia*. Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diserenggarakan oleh

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 22-24 November 2011.

- Djadjuli, R. Didi, "Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai", *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 4, Nomor 4, Tahun 2017.
- Habibi, Nur, "Praktik Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2014.
- Hadi, Sholikul dan Naila Fitriah Salamah, "Analisis Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Harkat Dan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat", *Constitution Journal*, Volume 2, Number 2, Desember 2023.
- Hadjon, Philipus M., "Tentang Wewenang", *Yuridika Jurnal Pro Justisia*, Volume 7, Nomor 5 dan 6 Tahun XII, September-Desember, 1997.
- Iskandar, Muhaimin, "Demokrasi, Parlemen dan Tata Nilai Baru; Mahkamah Kehormatan dan Tipe Ideal Lembaga Penegak Hukum Parlemen", *Arah Baru Kebijakan MKD DPR RI Periode 2019-2024 Upaya Menghadirkan Peradaban Hikmah*, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, 2020.
- Karyati, Sri, "Rekontruksi Kelembagaan Penegak Etika Parlemen", *Jurnal Etika dan Pemilu*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2015.
- Mamahit, Angel Jeane d'arc Sofia, "Pergeseran Kekuasaan Legislatif Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945", *Jurnal Lex Administratum*, Volume II, Nomor 2, April - Juni 2014.
- Novita, Nur Qomariah, "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Mahkamah Kehormatan Dewan". *Jurnal Katalogis*, Volume 4, Nomor 12, Desember 2016.
- Pinilih, Sekar Anggun Gading, "Penguatan Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan Sebagai Peradilan Etika", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50, Nomor 3, Juli 2021.
- Puasa, Rafly Rilandi, Johny Lumolos dan Neni Kumayas, "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro", *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2018.
- Putra, Pamungkas Satya, "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2016.

Rusnan, “Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Sistem Parlemen Di Indonesia”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2017.

Sinaga, Niru Anita, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 10, Nomor 2, Maret 2020.

Sondole, Erlis Milta Rin, “Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung”, *Jurnal EMBA*, Volume 3, Nomor 3, September 2015.

Supryadi, Ady, “Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD”, *Journal Law and Government*, Volume 1, Nomor 1, Februari 2023.

Suyadi, Asip “Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Penghentian Jabatan Ketua Dewan Dalam Sistem Ketatanegaraan”, *Pamulang Law Review*, Volume 1, Issue 2, November 2018.

Syafrudin, Ateng, “Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”. *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Syarifuddin dan Kemas Gerby Novario, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Penegakan Kode Etik DPR RI. *Jurnal Kajian*, Volume 22, Nomor 1 Maret 2017.

Winanto, Agus dan Hananto Widodo, “Problematika Hukum Persidangan Kode Etik Ketua DPR Setya Novanto Oleh Mahkamah Kehormatan DPR”, *Novum: Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2016.

Yunus, Nur Rohim, “Etika dan Moralitas Politik Anggota Dewan”, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 2, Nomor 2 Tahun, 2014.

E. Skripsi

Ramadhani, Rizqi, “Dilema Badan kehormatan DPR antara Penegak Etik Anggota Dewan dan Kepentingan Fraksi”, *Skripsi*, FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013.

Juliadi, Sefti, “Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD” *Skripsi*: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

F. Internet

Detik News. Pengertian, Tugas dan Wewenang MKD. <https://news.detik.com/berita/d-6253950/apa-itu-mkd-dpr-pengertian-tugas-dan-wewenang-mkd-dpr>., diakses Minggu, 06 Agustus 2023, Pukul 09.00 WIB.

<https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>., di akses Selasa, 07 Maret 2023, Pukul 09.45 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia., di akses Selasa, 07 Maret 2023, Pukul 09.45 WIB.

